

TUGAS AKHIR

**STUDI PELAYANAN FASILITAS SOSIAL GUNA MENUNJANG
FUNGSI PUSAT PELAYANAN KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Oleh:

IHSAN RIZALDI HAKIM

123060059



PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS PASUNDAN

BANDUNG

2018

ABSTRACT

Social facilities are a necessary support and a major requirement needed for daily survival in a particular area. The development of social facilities such as educational facilities, healthcare, trade and services have a very important role in supporting economic, social, cultural activities as well as the unity and integrity of the nation, especially as a basic capital in facilitating interaction and communication among communities which also can bind and connect a region/cities with others. Therefore, the development of a region/city should be followed by the availability of complete facilities which can serve the needs of the community, so the availability and service of social facilities need to be seen again. This is similar to what happens in every service center of West Bandung regency which requires study on service level based on the condition of social facilities.

The purpose of the study is to identify and analyze the level of service based on social facilities in each service center in West Bandung regency. The used method in the preparation of this report is quantitative and qualitative methods, where the quantitative method is to calculate the level of service based on SNI 03-1733-2004 about Procedures for Urban Housing Environmental Planning, Ministry of Education and Culture Standard, and Ministry of Health Standard, while the qualitative method is by looking at the results of public perception analysis.

The result of this research is to see how big the level of service from each service center based in the condition of social facilities to be able to support West Bandung Regency which also need to see where and what facilities that still need improvement service, so that need some additional in efforts to increase and equity of these social facilities which can serve the population optimally.

ABSTRAK

Fasilitas sosial merupakan suatu penunjang dan kebutuhan utama yang dibutuhkan dalam kelangsungan hidup sehari-hari pada sebuah wilayah tertentu. Pembangunan fasilitas sosial seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, juga perdagangan dan jasa memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya serta kesatuan dan persatuan bangsa terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi antar masyarakat juga dapat mengikat dan menghubungkan suatu wilayah/kota dengan wilayah/kota lainnya. Maka dari itu perkembangan suatu wilayah/kota hendaknya diikuti oleh ketersediaan fasilitas yang lengkap dan dapat melayani kebutuhan masyarakat, sehingga ketersediaan dan pelayanan fasilitas sosial tersebut perlu dilihat kembali. Hal ini sama halnya dengan yang terjadi pada setiap pusat pelayanan Kabupaten Bandung Barat yang memerlukan kajian mengenai tingkat pelayanan berdasarkan kondisi fasilitas sosialnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis tingkat pelayanan berdasarkan fasilitas sosial di setiap pusat pelayanan di Kabupaten Bandung Barat. Metode yang digunakan dalam penyusunan laporan ini yaitu metode kuantitatif dan kualitatif, dimana metode kuantitatifnya adalah dengan menghitung tingkat pelayanan berdasarkan Standar Nasional Indonesia 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, Standar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, serta Standar Departemen Kesehatan RI, sedangkan metode kualitatifnya adalah dengan melihat analisis hasil persepsi masyarakat.

Hasil dari penelitian ini yaitu dapat dilihat seberapa besar tingkat pelayanan dari setiap pusat pelayanan berdasarkan kondisi fasilitas sosial untuk dapat menunjang Kabupaten Bandung Barat yang mana perlu dilihat pula kecamatan mana dan fasilitas apa saja yang masih perlu peningkatan pelayanannya di Kabupaten Bandung Barat itu sendiri, sehingga diperlukan penambahan dalam upaya peningkatan dan pemerataan fasilitas sosial tersebut agar dapat melayani penduduk secara optimal.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan dan Sasaran.....	3
1.4 Ruang Lingkup Studi.....	4
1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah	4
1.4.2 Ruang Lingkup Materi	5
1.5 Metodologi Studi	7
1.5.1 Metode Pendekatan Studi	7
1.5.2 Metode Pengumpulan Data	7
1.5.3 Metode/Teknik Analisis	10
1.6 Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN TEORI	17
2.1 Teori Perencanaan Pengembangan Wilayah	17
2.1.1 Pengertian Perencanaan Wilayah	17
2.1.2 Pengertian Pengembangan Wilayah.....	18
2.2 Teori Pusat Pelayanan	20
2.2.1 Dasar Pemikiran Perlunya Pusat Pelayanan.....	23
2.2.2 Fungsi Hirarki Pusat Pelayanan	24
2.3 Pengertian Fasilitas Penunjang Fungsi Pusat Pelayanan.....	32
2.3.1 Jenis Fasilitas Sosial.....	34
2.3.2 Tingkat Pelayanan Fasilitas Sosial.....	38
2.4 Kriteria dan Parameter Fungsi Pusat Pelayanan.....	52
2.5 Metode Analisis.....	55
2.5.1 Metode Kuantitatif	55
2.5.2 Metode Kualitatif	56
2.6 Studi Terdahulu	57
2.6.1 Evaluasi Ketersediaan dan Kebutuhan Fasilitas Umum Berdasarkan Persepsi Masyarakat di Lingkungan Perumahan Permata Biru di Kabupaten Bandung	57
2.6.2 Kajian Tingkat Pelayanan Fasilitas Sosial Berdasarkan Persepsi Masyarakat di Perkotaan Subang	57
2.6.3 Penentuan Pusat-Pusat Pelayanan di Kabupaten Tangerang.....	57
2.6.4 Kajian Pengembangan Pusat-Pusat Pelayanan di Wilayah Kabupaten Bandung Barat.....	58
2.6.5 Studi Penentuan Pusat-Pusat Pelayanan di Kabupaten Bandung.....	58
2.6.6 Kajian Penentuan Pusat Pelayanan di Kabupaten Gunung Mas	59

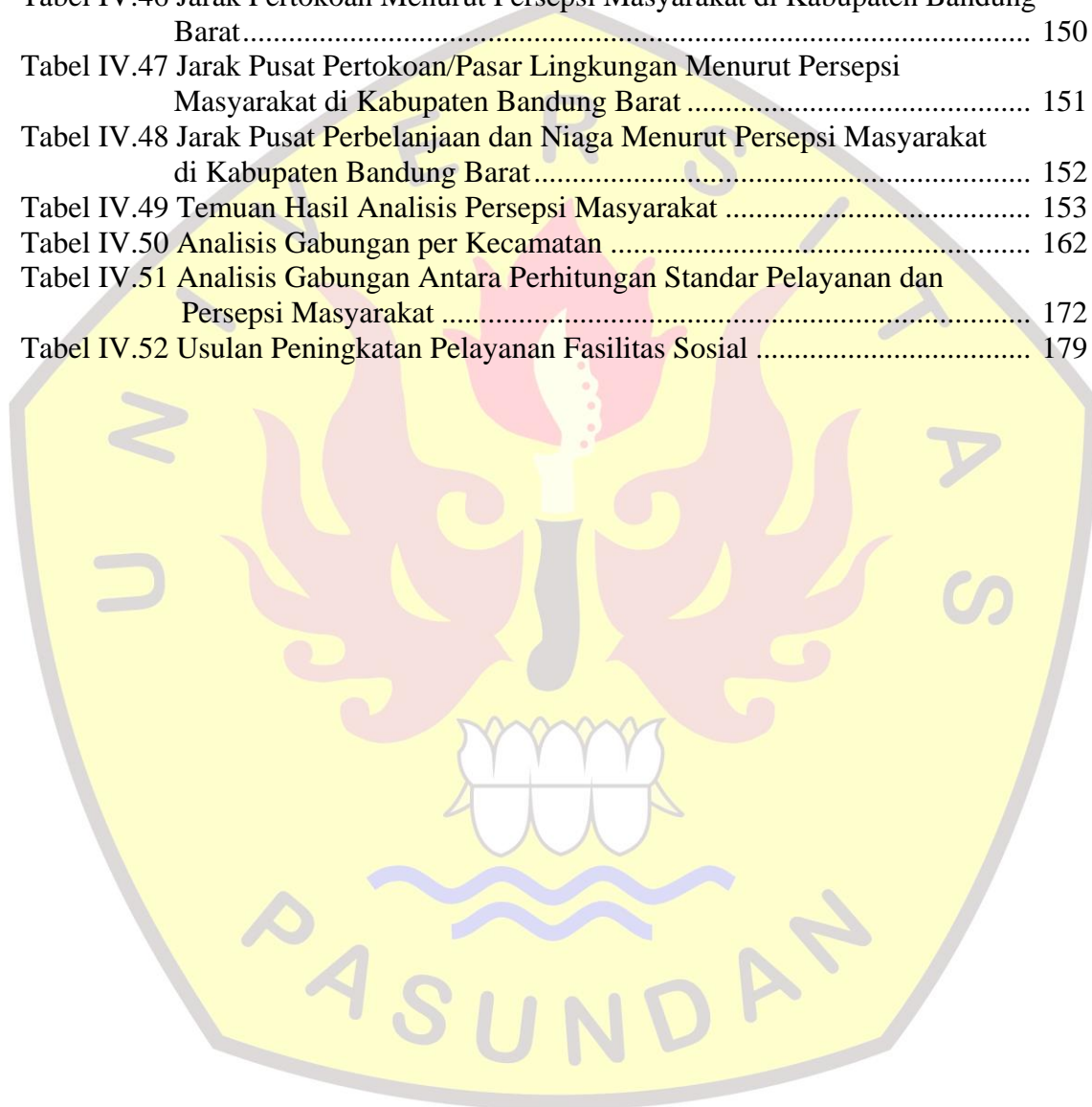
BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI	62
3.1 Gambaran Umum Wilayah Studi	62
3.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Bandung Barat.....	62
3.1.2 Letak Geografis Kabupaten Bandung Barat.....	63
3.1.3 Kondisi Demografis Kabupaten Bandung Barat.....	67
3.2 Karakteristik Fasilitas Sosial Kabupaten Bandung Barat.....	72
3.2.1 Sebaran Fasilitas Pendidikan.....	72
3.2.2 Sebaran Fasilitas Kesehatan	74
3.2.3 Sebaran Fasilitas Perdagangan	76
BAB IV ANALISIS TINGKAT PELAYANAN FASILITAS SOSIAL PADA PUSAT PELAYANAN KABUPATEN BANDUNG BARAT	81
4.1 Analisis Pemenuhan Standar Fasilitas Sosial di Kabupaten Bandung Barat	81
4.1.1 Analisis Pemenuhan Standar Fasilitas Pendidikan.....	81
4.1.2 Analisis Pemenuhan Standar Fasilitas Kesehatan.....	92
4.1.3 Analisis Pemenuhan Standar Fasilitas Perdagangan	102
4.1.4 Temuan Hasil Analisis Standar Pelayanan.....	110
4.2 Analisis Tingkat Pelayanan Fasilitas Sosial Berdasarkan Persepsi Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat	115
4.2.1 Fasilitas Pendidikan.....	115
4.2.2 Fasilitas Kesehatan	129
4.2.3 Fasilitas Perdagangan	142
4.2.4 Temuan Hasil Analisis Persepsi Masyarakat	153
4.3 Analisis Gabungan Tingkat Pelayanan Fasilitas Sosial.....	161
4.4 Usulan Peningkatan Pelayanan Fasilitas Sosial	179
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	182
5.1 Kesimpulan.....	182
5.2 Rekomendasi	184
5.3 Kelemahan Studi	186
5.4 Studi Lanjutan	186
DAFTAR PUSTAKA	187

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Ruang Lingkup Wilayah Studi	4
Tabel I.2 Standar Kebutuhan Fasilitas Sosial	12
Tabel II.1 Pedoman Perencanaan Kebutuhan Sarana Lingkungan	46
Tabel II.2 Hirarki Pelayanan Fasilitas Sosial	47
Tabel II.3 Hirarki Pusat-Pusat Pelayanan	52
Tabel II.4 Hirarki Pusat-Pusat Pelayanan Menurut Jangkauan Pelayanan dan Jumlah Penduduk	54
Tabel II.5 Faktor Variabel	56
Tabel II.6 Matriks Kajian Studi Terdahulu	60
Tabel III.1 Hirarki Pusat Pelayanan Kabupaten Bandung Barat	62
Tabel III.2 Nama, Luas Wilayah per-Kecamatan dan Jumlah Desa	64
Tabel III.3 Indikator Kependudukan Kabupaten Bandung Barat	67
Tabel III.4 Penduduk menurut Kelompok Umur	67
Tabel III.5 Penduduk menurut Umur per Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat	68
Tabel III.6 Jumlah Penduduk per Kecamatan 2011-2015	69
Tabel III.7 Jumlah dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan	70
Tabel III.8 Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011-2015	72
Tabel III.9 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011-2015	74
Tabel III.10 Jumlah Fasilitas Perdagangan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011-2015	76
Tabel IV.1 Skala Pelayanan Fasilitas Pendidikan	82
Tabel IV.2 Tingkat Pelayanan SD (Sekolah Dasar) di Kabupaten Bandung Barat	82
Tabel IV.3 Tingkat Pelayanan SMP (Sekolah Menengah Pertama) di Kabupaten Bandung Barat	83
Tabel IV.4 Tingkat Pelayanan SMA (Sekolah Menengah Atas) di Kabupaten Bandung Barat	85
Tabel IV.5 Tingkat Pelayanan PT (Perguruan Tinggi) di Kabupaten Bandung Barat	86
Tabel IV.6 Skala Pelayanan Fasilitas Kesehatan	92
Tabel IV.7 Tingkat Pelayanan Balai Pengobatan di Kabupaten Bandung Barat	93
Tabel IV.8 Tingkat Pelayanan Apotik di Kabupaten Bandung Barat	94
Tabel IV.9 Tingkat Pelayanan Puskesmas di Kabupaten Bandung Barat	95
Tabel IV.10 Tingkat Pelayanan Rumah Sakit di Kabupaten Bandung Barat	96
Tabel IV.11 Skala Pelayanan Fasilitas Perdagangan	102
Tabel IV.12 Tingkat Pelayanan Pertokoan di Kabupaten Bandung Barat	103
Tabel IV.13 Tingkat Pelayanan Pusat Pertokoan/Pasar Lingkungan di Kabupaten Bandung Barat	104
Tabel IV.14 Tingkat Pelayanan Pusat Perbelanjaan dan Niaga di Kabupaten Bandung Barat	105
Tabel IV.15 Temuan dan Hasil Analisis Standar Pelayanan	110
Tabel IV.16 Ketersediaan SD (Sekolah Dasar) Menurut Persepsi Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat	116
Tabel IV.17 Ketersediaan SMP (Sekolah Menengah Pertama) Menurut Persepsi Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat	117

Tabel IV.18 Ketersediaan SMA (Sekolah Menengah Atas) Menurut Persepsi Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat	118
Tabel IV.19 Ketersediaan PT (Perguruan Tinggi) Menurut Persepsi Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat	119
Tabel IV.20 Kondisi Bangunan SD (Sekolah Dasar) Menurut Persepsi Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat	120
Tabel IV.21 Kondisi Bangunan SMP (Sekolah Menengah Pertama) Menurut Persepsi Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat	121
Tabel IV.22 Kondisi Bangunan SMA (Sekolah Menengah Atas) Menurut Persepsi Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat	122
Tabel IV.23 Kondisi Bangunan PT (Perguruan Tinggi) Menurut Persepsi Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat	124
Tabel IV.24 Jarak SD (Sekolah Dasar) Menurut Persepsi Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat	125
Tabel IV.25 Jarak SMP (Sekolah Menengah Pertama) Menurut Persepsi Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat	126
Tabel IV.26 Jarak SMA (Sekolah Menengah Atas) Menurut Persepsi Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat	127
Tabel IV.27 Jarak PT (Perguruan Tinggi) Menurut Persepsi Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat	128
Tabel IV.28 Ketersediaan Balai Pengobatan Menurut Persepsi Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat	129
Tabel IV.29 Ketersediaan Apotik Menurut Persepsi Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat	130
Tabel IV.30 Ketersediaan Puskesmas Menurut Persepsi Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat	131
Tabel IV.31 Ketersediaan Rumah Sakit Menurut Persepsi Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat	132
Tabel IV.32 Kondisi Bangunan Balai Pengobatan Menurut Persepsi Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat	134
Tabel IV.33 Kondisi Bangunan Apotik Menurut Persepsi Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat	135
Tabel IV.34 Kondisi Bangunan Puskesmas Menurut Persepsi Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat	136
Tabel IV.35 Kondisi Bangunan Rumah Sakit Menurut Persepsi Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat	137
Tabel IV.36 Jarak Balai Pengobatan Menurut Persepsi Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat	139
Tabel IV.37 Jarak Apotik Menurut Persepsi Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat	140
Tabel IV.38 Jarak Puskesmas Menurut Persepsi Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat	141
Tabel IV.39 Jarak Rumah Sakit Menurut Persepsi Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat	142
Tabel IV.40 Ketersediaan Pertokoann Menuru Persepsi Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat	143
Tabel IV.41 Ketersediaan Pusat Pertokoan/Pasar Lingkungan Menurut Persepsi Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat	144

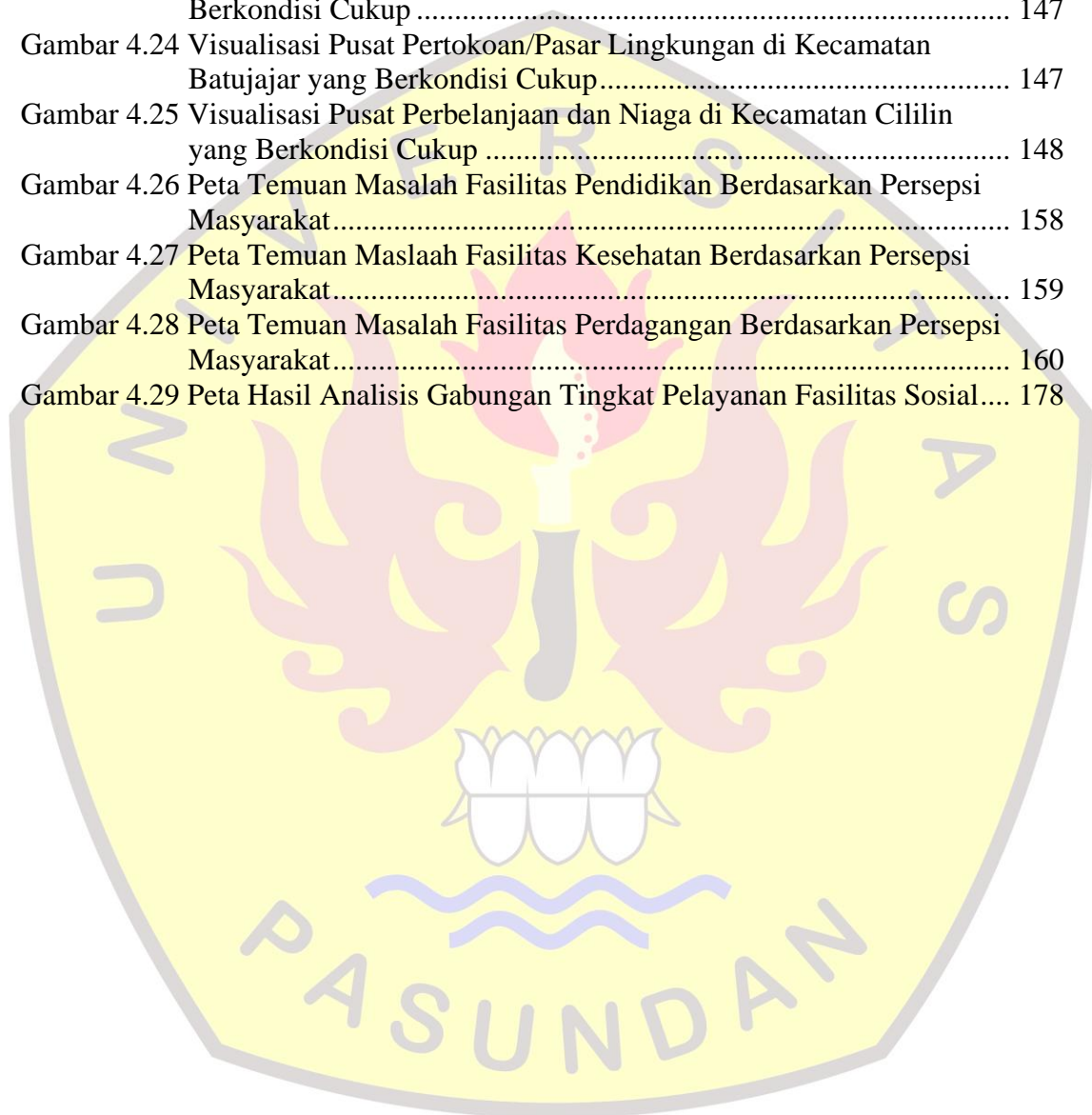
Tabel IV.42 Ketersediaan Pusat Perbelanjaan dan Niaga Menurut Persepsi Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat	145
Tabel IV.43 Kondisi Bangunan Pertokoan Menurut Persepsi Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat	146
Tabel IV.44 Kondisi Bangunan Pusat Pertokoan/Pasar Lingkungan Menurut Persepsi Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat	148
Tabel IV.45 Kondisi Bangunan Pusat Perbelanjaan dan Niaga Menurut Persepsi Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat	149
Tabel IV.46 Jarak Pertokoan Menurut Persepsi Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat	150
Tabel IV.47 Jarak Pusat Pertokoan/Pasar Lingkungan Menurut Persepsi Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat	151
Tabel IV.48 Jarak Pusat Perbelanjaan dan Niaga Menurut Persepsi Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat	152
Tabel IV.49 Temuan Hasil Analisis Persepsi Masyarakat	153
Tabel IV.50 Analisis Gabungan per Kecamatan	162
Tabel IV.51 Analisis Gabungan Antara Perhitungan Standar Pelayanan dan Persepsi Masyarakat	172
Tabel IV.52 Usulan Peningkatan Pelayanan Fasilitas Sosial	179



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Administrasi Wilayah Kajian	6
Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran Studi	15
Gambar 3.1 Peta Administrasi Kabupaten Bandung Barat.....	66
Gambar 3.2 Persentase Penduduk Menurut Umur di Kabupaten Bandung Barat ...	68
Gambar 3.3 Grafik Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011-2015	69
Gambar 3.4 Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Bandung Barat	71
Gambar 3.5 Grafik Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011-2015	73
Gambar 3.6 Grafik Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011-2015	75
Gambar 3.7 Grafik Jumlah Fasilitas Perdagangan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011-2015	77
Gambar 3.8 Peta Sebaran Fasilitas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat	78
Gambar 3.9 Peta Sebaran Fasilitas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat	79
Gambar 3.10 Peta Sebaran Fasilitas Perdagangan Kabupaten Bandung Barat	80
Gambar 4.1 Peta Jangkauan Pelayanan Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung Barat.....	88
Gambar 4.2 Peta Jangkauan Pelayanan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bandung Barat	89
Gambar 4.3 Peta Jangkauan Pelayanan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Bandung Barat	90
Gambar 4.4 Peta Jangkauan Pelayanan Perguruan Tinggi di Kabupaten Bandung Barat.....	91
Gambar 4.5 Peta Jangkauan Pelayanan Balai Pengobatan di Kabupaten Bandung Barat.....	98
Gambar 4.6 Peta Jangkauan Pelayanan Apotik di Kabupaten Bandung Barat.....	99
Gambar 4.7 Peta Jangkauan Pelayanan Puskesmas di Kabupaten Bandung Barat .	100
Gambar 4.8 Peta Jangkauan Pelayanan Rumah Sakit di Kabupaten Bandung Barat.....	101
Gambar 4.9 Peta Jangkauan Pelayanan Pertokoan di Kabupaten Bandung Barat...	107
Gambar 4.10 Peta Jangkauan Pelayanan Pusat Pertokoan/Pasar Lingkungan di Kabupaten Bandung Barat	108
Gambar 4.11 Peta Jangkauan Pelayanan Pusat Perbelanjaan dan Niaga di Kabupaten Bandung Barat	109
Gambar 4.12 Peta Temuan Masalah Fasilitas Pendidikan Berdasarkan Standar Pelayanan	112
Gambar 4.13 Peta Temuan Masalah Fasilitas Kesehatan Berdasarkan Standar Pelayanan	113
Gambar 4.14 Peta Temuan Masalah Fasilitas Perdagangan Berdasarkan Standar Pelayanan	114
Gambar 4.15 Visualisasi SD di Kecamatan Cihampelas yang Berkondisi Baik	120
Gambar 4.16 Visualisasi SMP di Kecamatan Cisarua yang Berkondisi Baik.....	122
Gambar 4.17 Visualisasi SMA di Kecamatan Padalarang yang Berkondisi Baik...	123
Gambar 4.18 Visualisasi PT di Kecamatan Parongpong yang Berkondisi Baik	123

Gambar 4.19 Visualisasi Balai Pengobatan di Kecamatan Batujajar yang Berkondisi Cukup	130
Gambar 4.20 Visualisasi Apotik di Kecamatan Ngamprah yang Berkondisi Baik .	135
Gambar 4.21 Visualisasi Puskesmas di Kecamatan Cisarua yang Berkondisi Buruk	137
Gambar 4.22 Visualisasi Rumah Sakit di Kecamatan Cililin yang Berkondisi Baik.....	138
Gambar 4.23 Visualisasi Pertokoan di Kecamatan Cikalongwetan yang Berkondisi Cukup	147
Gambar 4.24 Visualisasi Pusat Pertokoan/Pasar Lingkungan di Kecamatan Batujajar yang Berkondisi Cukup.....	147
Gambar 4.25 Visualisasi Pusat Perbelanjaan dan Niaga di Kecamatan Cililin yang Berkondisi Cukup	148
Gambar 4.26 Peta Temuan Masalah Fasilitas Pendidikan Berdasarkan Persepsi Masyarakat.....	158
Gambar 4.27 Peta Temuan Maslaah Fasilitas Kesehatan Berdasarkan Persepsi Masyarakat.....	159
Gambar 4.28 Peta Temuan Masalah Fasilitas Perdagangan Berdasarkan Persepsi Masyarakat.....	160
Gambar 4.29 Peta Hasil Analisis Gabungan Tingkat Pelayanan Fasilitas Sosial....	178



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Struktur ruang dari suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh ukuran (luas wilayah) wilayah tersebut dan juga pola persebaran kawasan permukiman penduduknya. Semakin besar ukuran suatu wilayah, maka akan semakin menyebar pula lokasi kawasan permukiman penduduknya. Hal ini akan berdampak pada semakin banyaknya jumlah pusat pelayanan yang dibutuhkan. Suatu wilayah yang tidak terlalu besar dengan tingkat kepadatan penduduk yang rendah, maka akan cukup efektif dan efisien untuk dilayani oleh hanya satu pusat wilayah. Wilayah dengan keadaan seperti itu cenderung akan mempunyai struktur monosentrik (satu pusat). Sebaliknya untuk suatu wilayah besar dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, maka tidak akan cukup efektif dan efisien untuk dilayani oleh hanya satu pusat saja. Struktur wilayah yang memiliki banyak pusat inilah yang dinamakan struktur polisentrik (banyak pusat). Struktur polisentrik tersebut dapat dikatakan sebagai suatu penyimpangan jumlah pusat pelayanan yang merupakan konsekuensi dari ukuran kota yang semakin membesar (Mulyana, 2005: 3).

Pada struktur polisentrik, pusat pelayanan yang memegang peranan penting adalah pusat primer dan pusat sekunder. Hal ini dikarenakan luas wilayah cakupan layanannya yang cukup luas. Pusat primer merupakan suatu kawasan pada suatu wilayah yang merupakan pusat dari segala kegiatan kota, antara lain politik, sosial budaya, ekonomi dan teknologi. Sementara itu, pusat sekunder merupakan titik pada suatu bagian wilayah yang merupakan pusat pelayanan bagi bagian wilayah tersebut. Pusat sekunder tersebut berperan dalam membantu fungsi pelayanan pusat primer, yang minimalnya harus berisikan berbagai fasilitas wilayah yang fungsi pelayanannya dibutuhkan oleh penduduk hampir setiap hari atau dibutuhkan dalam frekuensi yang tinggi. Oleh karena itu, didalamnya terdapat fungsi yang didukung oleh tersedianya berbagai fasilitas wilayah yang dapat melayani seluruh masyarakat dari berbagai penjuru wilayah.

Sebagai suatu wilayah, Kabupaten Bandung Barat juga memiliki bentuk struktur ruang yang terintegrasi satu dengan yang lainnya. Diantaranya terdiri dari pengembangan sistem pusat pelayanan dan juga sistem jaringan prasarana wilayah. Pengembangan sistem pusat pelayanan yang ada di Kabupaten Bandung Barat tersebut didalamnya terkandung suatu pengembangan sistem perkotaan dan sistem perdesaan, dimana untuk pengembangan sistem perkotaannya terdiri atas rencana sistem pusat kegiatan disertai dengan fungsinya masing-masing. Diantaranya seperti PKL yang diarahkan berada di Kecamatan Ngamprah, Padalarang, Cikalongwetan, Cililin dan Lembang yang berfungsi sebagai kawasan perdagangan dan jasa, industri, perekonomian untuk skala regional, dan lainnya, dibantu oleh PPK di Kecamatan Batujajar, Cihampelas, Cipatat, Cipeundeuy dan Cisarua dengan fungsi sebagai kawasan pusat pelayanan skala antar kecamatan baik itu fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, serta PPL sebagai pusat pelayanan terkecil. Berkaitan dengan rencana pengembangan sistem pusat pelayanan di Wilayah Kabupaten Bandung Barat tersebut, maka diperlukan adanya kajian berdasarkan fungsi yang dimiliki oleh setiap pusat pelayanan di Kabupaten Bandung Barat, apakah fungsi pusat pelayanan tersebut sudah memiliki tingkat pelayanan yang baik kepada masyarakat, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, dilihat dari kondisi fasilitas sosial penunjangnya.

Proses studi tingkat pelayanan berdasarkan fasilitas penunjang pada fungsi pusat pelayanan di Wilayah Kabupaten Bandung Barat itulah yang merupakan hal utama yang menjadi bahan kajian dalam studi ini. Selain itu, studi ini juga berusaha memberikan rekomendasi yang didasarkan pada hasil kajian.

1.2 Perumusan Masalah

Adanya rencana struktur ruang berupa struktur pusat pelayanan di Kabupaten Bandung Barat diharapkan dapat mengotimalkan distribusi potensi sumber daya yang mampu menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Bandung Barat itu sendiri. Dengan ditetapkannya rencana struktur ruang pada RTRW Kabupaten Bandung Barat tahun 2009-2029, maka terbentuklah hirarki pusat-pusat pelayanan yang jelas seperti adanya penetapan PKL yang harus dapat

melayani seluruh wilayah, PPK yang diharapkan dapat melayani kebutuhan kecamatan itu sendiri dan kecamatan lain disekitarnya, serta PPL yang minimalnya harus dapat melayani dirinya sendiri secara mandiri. Namun dengan adanya penetapan hirarki pusat pelayanan tersebut tidak berarti bahwa pelayanan yang ada sudah sepenuhnya dapat melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Bandung Barat secara optimal, masih perlu dilakukannya peningkatan fungsi yang ada pada setiap hirarki yang dapat didukung dengan dilakukannya pengarahannya pengembangan tiap hirarki berdasarkan fungsinya guna terciptanya pemerataan pelayanan pada keseluruhan sistem perwilayahannya (Fitrilia, 2009).

Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka terdapat beberapa pertanyaan penelitian, diantaranya:

- Bagaimana kondisi fasilitas sosial yang ada dalam mendukung fungsi pusat pelayanan di Kabupaten Bandung Barat?
- Bagaimana persepsi masyarakat Kabupaten Bandung Barat dalam menilai pelayanan dari setiap fasilitas sosial yang sudah ada?
- Sejauhmana tingkat pelayanan dari setiap fungsi pusat pelayanan dan fungsi manakah yang harus ditingkatkan di Kabupaten Bandung Barat dilihat dari kondisi fasilitas sosialnya?

1.3 Tujuan dan Sasaran

Dengan melihat pada rumusan persoalan pada bagian sebelumnya, maka dapat dirumuskan tujuan dari studi ini. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tingkat pelayanan fasilitas sosial pada sistem pelayanan Kabupaten Bandung Barat, sehingga pengembangan setiap pusat pelayanan di Wilayah Kabupaten Bandung Barat tersebut diharapkan dapat berdampak langsung pada menurunnya tingkat ketergantungan seluruh bagian wilayah Kabupaten Bandung Barat. Berkaitan dengan tujuan studi tersebut, maka sasaran yang ingin dicapai dari studi ini adalah sebagai berikut:

1. Teridentifikasinya ketersediaan fasilitas sosial yang ada di setiap pusat pelayanan Kabupaten Bandung Barat.

2. Teridentifikasinya besaran kebutuhan untuk setiap fasilitas sosial pada pusat pelayanan Kabupaten Bandung Barat.
3. Teridentifikasinya tingkat pelayanan dari sistem pusat pelayanan di Kabupaten Bandung Barat dilihat dari fasilitas sosialnya.
4. Teridentifikasinya arahan dan rekomendasi yang tepat guna mendorong pengembangan pusat pelayanan di Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan fungsinya.

1.4 Ruang Lingkup Studi

Ruang lingkup studi ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi.

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang Lingkup Wilayah dari studi ini adalah Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari 16 kecamatan dengan struktur pusat pelayanan yang terdiri dari 5 Pusat Kegiatan Lokal (PKL), 5 Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan 6 Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Ruang lingkup wilayah ini dapat dilihat secara jelas pada tabel I.1 dan pada gambar 1.1.

Tabel I.1
Ruang Lingkup Wilayah Studi

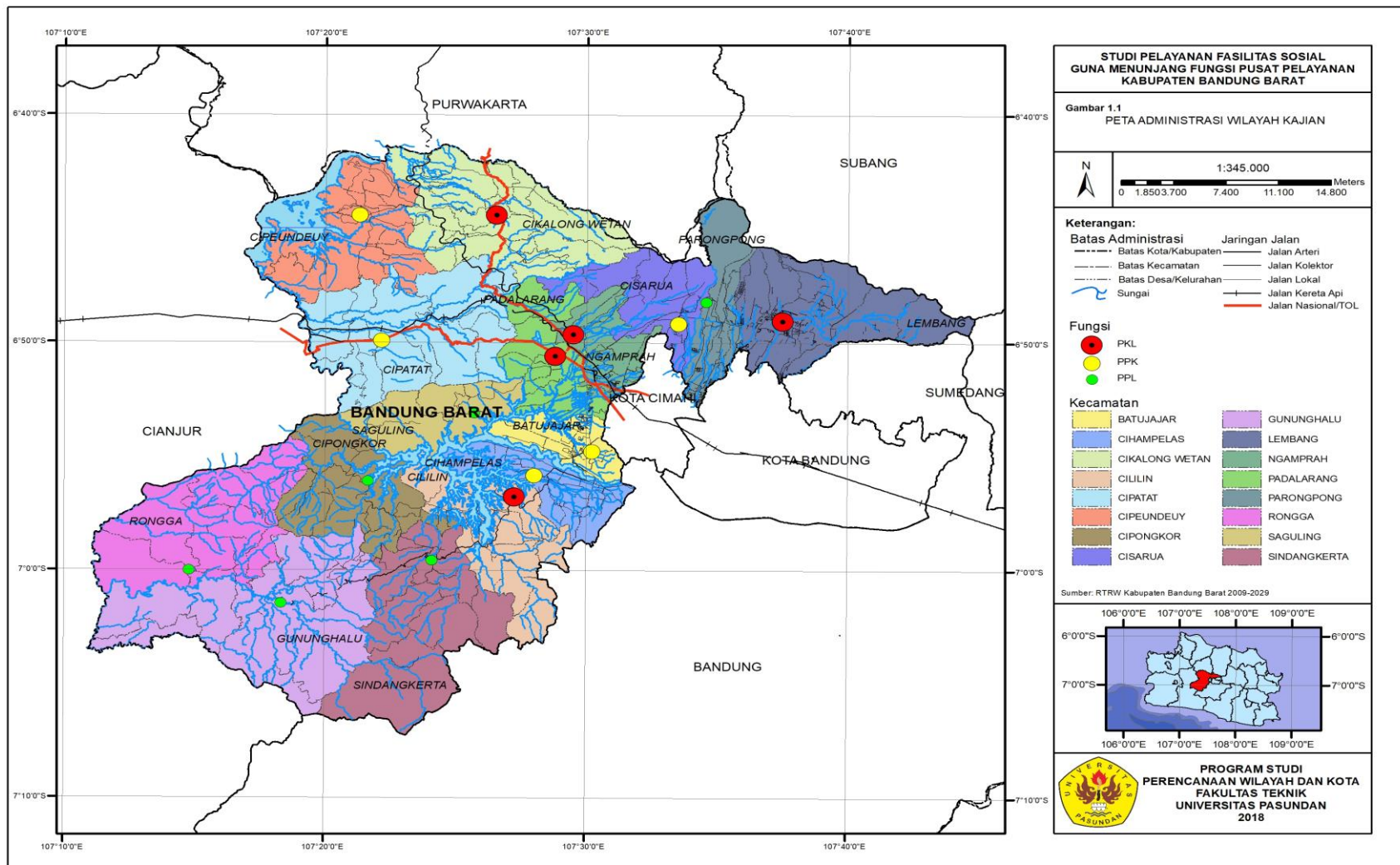
No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Luas (Ha)	Fungsi
1	Ngamprah	11	3.001	PKL
2	Padalarang	10	5.121	
3	Cikalongwetan	13	11.298	
4	Cililin	11	8.154	
5	Lembang	16	9.784	
6	Batujajar	7	3.118	PPK
7	Cihampelas	10	4.663	
8	Cipatat	12	12.548	
9	Cipeundeuy	12	10.126	
10	Cisarua	8	5.178	PPL
11	Cipongkor	14	7.638	
12	Gununghalu	9	15.509	
13	Parongpong	7	4.364	
14	Rongga	8	11.315	
15	Saguling	6	5.142	
16	Sindangkerta	11	12.035	
Kabupaten Bandung Barat		165	128.994	

Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Barat 2009-2029

1.4.2 Ruang Lingkup Materi

Studi ini merupakan kajian terhadap rencana pengembangan sistem pusat pelayanan yang dirumuskan dalam RTRW Kabupaten Bandung Barat tahun 2009-2029. Dalam hal ini, yang menjadi fokus studi adalah tingkat pelayanan setiap pusat pelayanan di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan fasilitas sosial penunjangnya. Secara garis besar, adapun ruang lingkup materi studi ini adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan ketersediaan jenis fasilitas sosial yang mencakup fasilitas pendidikan (SD, SMP, SMA dan PT), fasilitas kesehatan (Balai Pengobatan, Apotik, Puskesmas dan Rumah Sakit) dan fasilitas perdagangan (Pertokoan, Pusat Pertokoan + Pasar Lingkungan dan Pusat Perbelanjaan dan Niaga) di Kabupaten Bandung Barat.
2. Identifikasi tingkat kebutuhan fasilitas sosial berdasarkan hirarki sistem pusat pelayanan yang ada di Kabupaten Bandung Barat
3. Identifikasi tingkat pelayanan fasilitas sosial dari fungsi setiap pusat pelayanan dengan menyandingkan tingkat pelayanan berdasarkan standar dan persepsi masyarakat sebagai pemakai fasilitas.
4. Perumusan arahan dan rekomendasi dari keseluruhan hasil analisis yang dilakukan.



1.5 Metodologi Studi

Dalam penelitian “Studi Pelayanan Fasilitas Sosial Guna Menunjang Fungsi Pusat Pelayanan Kabupaten Bandung Barat” ini secara keseluruhan, metodologi studi yang digunakan dibagi menjadi tiga bagian yaitu metode pendekatan studi, metode pengumpulan data, dan metode/teknik analisis yang digunakan.

1.5.1 Metode Pendekatan Studi

Untuk mencapai keluaran akhir atau *output* yang sesuai dengan tujuan Studi Pelayanan Fasilitas Sosial Guna Menunjang Fungsi Pusat Pelayanan Kabupaten Bandung Barat ini maka secara keseluruhan akan dilakukan beberapa pendekatan yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan studi literatur mengenai teori-teori maupun konsep yang berhubungan dengan pengidentifikasian tingkat pelayanan setiap pusat pelayanan berdasarkan fasilitas sosial. Hal ini dimaksudkan untuk mengenal dan memahami tentang landasan teoritis yang diterapkan dalam proses penelitian.
2. Melakukan tinjauan terhadap pusat pelayanan yang telah ada dengan melihat karakteristik ketersediaan fasilitas sosial di setiap pusat pelayanan di Kabupaten Bandung Barat.
3. Melakukan identifikasi tingkat kebutuhan dan lingkup pelayanan fasilitas sosial berdasarkan fungsi masing-masing pusat pelayanan yang ada di Kabupaten Bandung Barat.
4. Melakukan kegiatan penyusunan hasil analisis dari hasil data dan informasi yang diperoleh dan dibuat dalam bentuk laporan tugas akhir

1.5.2 Metode Pengumpulan Data

Studi ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode survei. Data yang dihasilkan dalam suatu survei sangat menunjang sekali dalam penelitian suatu studi, baik itu data kualitatif maupun kuantitatif. Dalam studi ini, pengumpulan data dilakukan secara primer dan juga sekunder.

A. Metode Pengumpulan Data Primer

Adalah survei yang dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi kajian, teknik yang digunakan diantaranya sebagai berikut:

1. Observasi Lapangan

Observasi lapangan dilakukan dengan mengamati keadaan karakteristik wilayah studi serta dokumentasi untuk melengkapi data-data yang diperlukan. Observasi lapangan dilakukan dengan pandangan berbagai segi kegiatan. Hal ini dimaksudkan untuk membandingkan antara output yang dihasilkan dengan keadaan sebenarnya dilapangan. Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan cara pemotretan dengan maksud untuk memperlihatkan kondisi eksisting dari wilayah tersebut. Dalam hal ini, observasi yang dilakukan adalah bertujuan untuk mendukung data letak dan kondisi bangunan fasilitas sosial di setiap pusat pelayanan yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Adapun perlengkapan yang dipakai diantaranya:

a) GPS

Digunakan untuk melakukan *plotting* lokasi fasilitas sosial yang ada di lapangan, sehingga dapat menjadi data masukkan dalam pemetaan.

b) Kamera

Digunakan untuk melakukan dokumentasi visual kondisi bangunan setiap fasilitas sosial di setiap pusat pelayanan di Kabupaten Bandung Barat

2. Wawancara

Teknik *sampling* yang digunakan dalam wawancara adalah berupa *purposive sampling*. Wawancara atau tanya jawab tersebut dilakukan terhadap responden yang dianggap dapat mewakili baik formal maupun non formal, yang diarahkan agar dapat mengetahui lebih dalam mengenai informasi yang tidak terdapat dalam literatur yang terdapat pada instansi yang terkait. *Output* dari wawancara diharapkan berupa informasi tambahan terkait karakteristik maupun kebutuhan fasilitas sosial di setiap pusat pelayanan sebagai informasi pendukung data sekunder yang ada.

Maka dapat ditetapkannya kriteria dari responden yang akan diwawancari pada penelitian ini, yang diharapkan dapat menjadi sampel yang mewakili dan memberikan informasi sesuai bidangnya sehingga tidak terjadi bias hasil penelitian dan menghasilkan informasi yang representatif, diantaranya:

a) Petugas Instansi Terkait

Petugas dinas terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan dinas terkait lainnya, khususnya kepala bidang perencanaan, yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai karakteristik fasilitas sosial yang ada di Kabupaten Bandung Barat.

b) Petugas Kecamatan Kajian

Kepala Kecamatan ataupun Sekretaris Kecamatan terkait untuk mengetahui gambaran mengenai karakteristik serta kebutuhan akan fasilitas sosial pada kecamatan terkait

3. Kuesioner

Kuesioner ini dilakukan dengan memberikan lembar pertanyaan kepada responden guna mendukung data sekunder yang diperoleh, serta sebagai bahan informasi dari tanggapan dari masyarakat secara langsung.

Untuk penyebaran kuesioner diambil beberapa sampel yang didasarkan pada rumus dari Slovin (1993);

$$n = \frac{N}{1 + N(e^2)}$$

Dimana:

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = Nilai kritis

(nilai kritis atau persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel sebesar 10% = 0,1, sehingga tingkat kepercayaan yang dihasilkan sebesar 90%)

B. Metode Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder adalah pengumpulan data yang meliputi:

1. Studi Pustaka

Adalah kegiatan mencari data-data yang terdapat dari bahan bacaan dan literatur buku-buku sesuai dengan kajian studi

2. Instansional

Adalah pengumpulan data yang erat kaitannya dengan masalah studi yang berasal dari instansi-instansi. Tujuannya adalah memperoleh data-data yang berkaitan dengan materi studi. Instansi yang terkait yaitu Bappeda, BPS, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kantor kecamatan terkait dan instansi-instansi lainnya.

1.5.3 Metode/Teknik Analisis

Untuk memberikan kajian pengembangan pusat-pusat pelayanan yang ada di Kabupaten Bandung Barat, maka dilakukan studi tingkat pelayanan dari fasilitas sosial untuk menunjang fungsi pusat pelayanan yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Untuk mengidentifikasi tingkat pelayanan dari fasilitas sosial tersebut secara garis besar adalah menggunakan analisis dengan metode deskriptif campuran yang didasarkan pada pedoman Standar Pelayanan Minimum dari setiap jenis fasilitas yang ada berdasarkan SNI 03-1733 tahun 2004 mengenai Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan dan juga berdasarkan pada persepsi masyarakat. Identifikasi ini bertujuan untuk mengetahui sebaran, tingkat kebutuhan, serta tingkat pelayanan dari setiap fasilitas sosial pada fungsi pusat pelayanan di Kabupaten Bandung Barat. Yang pada tahap akhirnya, studi ini memberikan usulan berdasarkan hasil analisis dalam usaha pengembangan wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Lebih rincinya, tahapan-tahapan pengerjaan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Menentukan Kriteria dan Indikator Penilaian Fungsi Pusat Pelayanan di Kabupaten Bandung Barat.

Yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah pusat pelayanan di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan tingkat pelayanan fasilitas sosial dari setiap fungsinya. Karena itu tahap pertama adalah perlu diketahui karakteristik masing-masing pusat pelayanan tersebut yang didapatkan melalui penelusuran literatur, dokumen formal dan analisis kebijakan untuk melihat arahan-arahan yang terdapat didalam kebijakan terkait pusat pelayanan Kabupaten Bandung Barat. Sehingga dapat diketahui aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam melakukan studi tingkat pelayanan fasilitas sosial pada setiap fungsi pusat pelayanan di Kabupaten Bandung Barat tersebut. Kriteria yang digunakan adalah kriteria yang disesuaikan dengan hirarki sistem pusat pelayanan yang terdiri dari Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang kemudian diturunkan kedalam indikator-indikator yang dijadikan dasar untuk menyusun kerangka survey dan menilai secara langsung fungsi setiap pusat pelayanan Kabupaten Bandung Barat untuk dapat menentukan perbedaan kebutuhan akan fasilitas sosial penunjangnya. Seperti kebutuhan fasilitas untuk PKL dimana harus memiliki fasilitas yang lengkap, mulai dari pelayanan kecil seperti SD dalam bidang pendidikan dan Apotik dalam bidang kesehatan, hingga pelayanan besar seperti Perguruan Tinggi dalam bidang pendidikan dan Rumah Sakit untuk bidang kesehatan. Berbeda dengan kebutuhan fasilitas untuk PPK dan PPL yang tidak harus lengkap hingga fasilitas pelayanan besar. Kriteria-kriteria tersebut kemudian diturunkan kedalam indikator-indikator diantaranya dilihat berdasarkan ketersediaan, jangkauan, serta tingkat pelayanan dari fasilitas sosial di Kabupaten Bandung Barat.

B. Mengidentifikasi Tingkat Pelayanan Fasilitas Berdasarkan Standar

Untuk mengetahui tingkat pelayanan fasilitas ini, adalah dengan melakukan analisis ketersediaan fasilitas, dan analisis tingkat pelayanan fasilitas dengan berdasarkan SNI 03-1733 tahun 2004 mengenai Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.

Analisis ketersediaan fasilitas, dilakukan dengan cara membandingkan jumlah penduduk yang ada dengan standar penduduk pendukung berdasarkan SNI 03-1733 tahun 2004, sehingga dapat dilihat jumlah fasilitas seharusnya untuk dapat memenuhi kebutuhan penduduk. Adapun rumus perhitungan analisis ketersediaan fasilitas tersebut adalah sebagai berikut;

$$\text{Jumlah yang Seharusnya} = \frac{\text{Jumlah Penduduk}}{\text{Standar Penduduk Pendukung}}$$

Setelah diketahui, maka dapat dilakukan analisis tingkat pelayanan setiap fasilitas nya, analisis ini dilakukan untuk dapat melihat besaran tingkat pelayanan dari setiap fasilitas yang dikaji. Adapun rumus yang digunakan dalam analisis tersebut adalah:

$$\text{Tingkat Pelayanan} = \frac{\text{Jumlah yang ada}}{\text{Jumlah yang seharusnya}} \times 100\%$$

Adapun ketentuan jumlah penduduk pendukung dan radius pelayanan setiap jenis fasilitas sosial berdasarkan SNI 03-1733 tahun 2004 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel I.2
Standar Kebutuhan Fasilitas Sosial

No.	Jenis Fasilitas	Jumlah Penduduk Pendukung (jiwa)		Radius Pelayanan (m)
A	Fasilitas Pendidikan	Siswa/Kelas*	Kelas/Sekolah*	
1	SD	40	6	1.000
2	SMP	30	6	1.000
3	SMA	30	6	3.000
4	PT		10.000	10.000
B	Fasilitas Kesehatan			
1	Balai Pengobatan		3.000	1.000
2	Apotik		10.000	1.500
3	Puskesmas		120.000	3.000
4	Rumah Sakit		240.000	10.000
C	Fasilitas Perdagangan			
1	Pertokoan		6.000	2.000
2	Pusat Pertokoan + Pasar Lingkungan		30.000	3.000
3	Pusat Perbelanjaan dan Niaga		120.000	10.000

Sumber: Badan Standardisasi Nasional, 2004

*) Kebutuhan Program Ruang Minimum

C. Mengidentifikasi Tingkat Pelayanan Fasilitas Berdasarkan Persepsi Masyarakat

Persepsi didefinisikan sebagai proses yang dilakukan individu untuk memilih, mengatur, dan menafsirkan stimuli ke dalam gambar yang berarti dan masuk akal, seperti merasakan bentuk, warna dan rasa lainnya dari stimuli yang ada, dimana persepsi tersebut juga dipengaruhi oleh pikiran dan lingkungan sekitarnya (Saparso, 2009: 98).

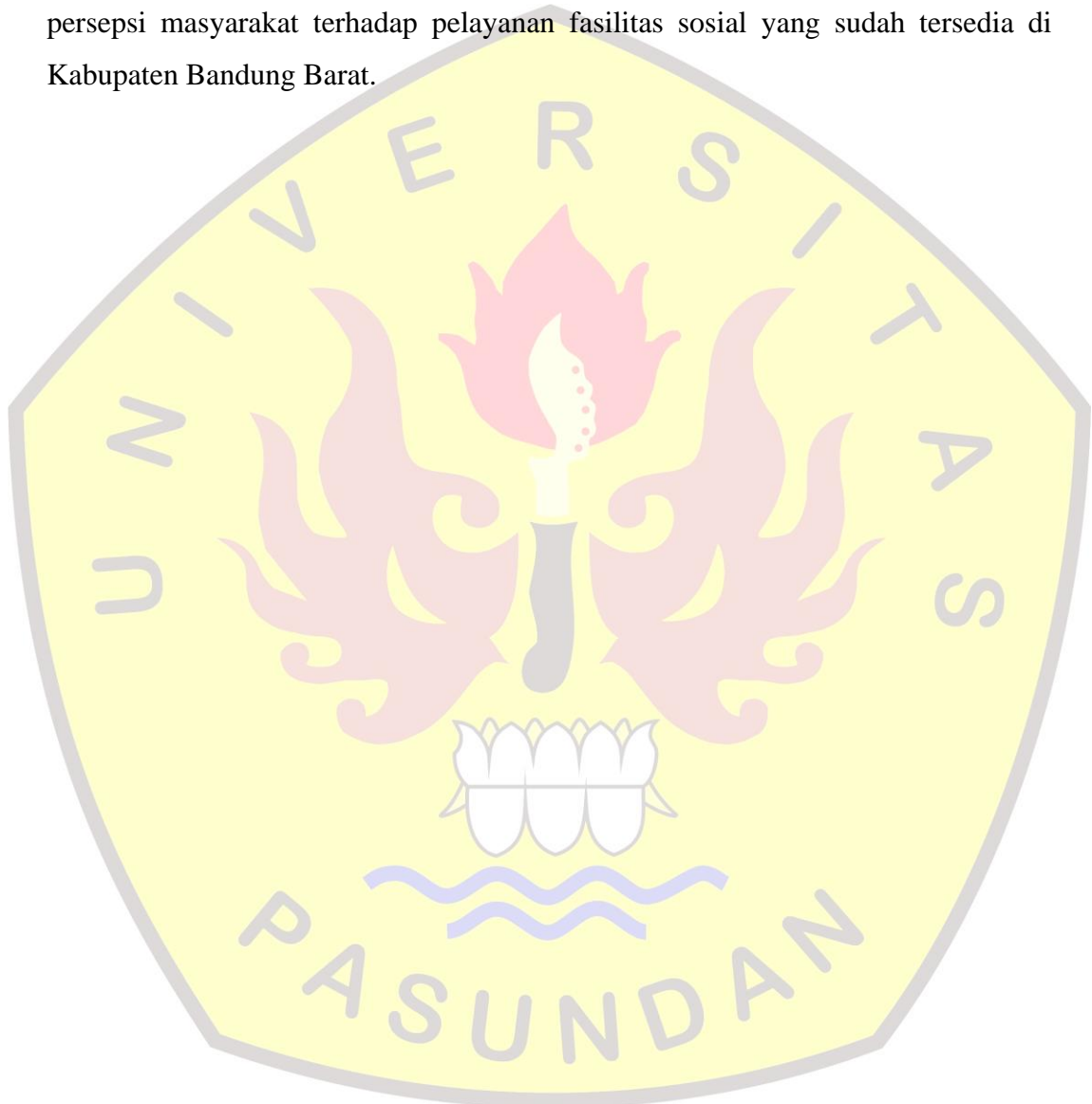
Untuk mengetahui tingkat pelayanan fasilitas berdasarkan persepsi masyarakat di Kabupaten Bandung Barat, dilakukan penyebaran kuesioner kepada masyarakat di setiap kecamatan yang tujuannya untuk mengetahui jenis fasilitas apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di Kabupaten Bandung Barat pada setiap kecamatannya, sehingga dapat diketahui lebih jelas tentang pelayanan fasilitas terhadap masyarakat. Artinya, persepsi masyarakat yang dihasilkan dari kuesioner adalah untuk melihat bahwa masyarakat bisa memberikan respon dengan adanya pelayanan yang disediakan. Adapun kuesioner tersebut bersifat tertutup.

Untuk mengetahui hasil informasi dari persepsi masyarakat terhadap kondisi fasilitas umum tersebut, dilakukanlah analisis deskriptif yaitu dengan menyusun dan menganalisis data dalam uraian dan disajikan dalam bentuk tabel persepsi masyarakat terhadap fasilitas sosial di Kabupaten Bandung Barat. Dimana hasil informasi persepsi masyarakat tersebut menjadi masukkan untuk dianalisis secara keseluruhan didalam analisis persandingan bersama hasil informasi analisis standar pelayanan minimum.

D. Mengidentifikasi Tingkat Pelayanan Berdasarkan Analisis Gabungan

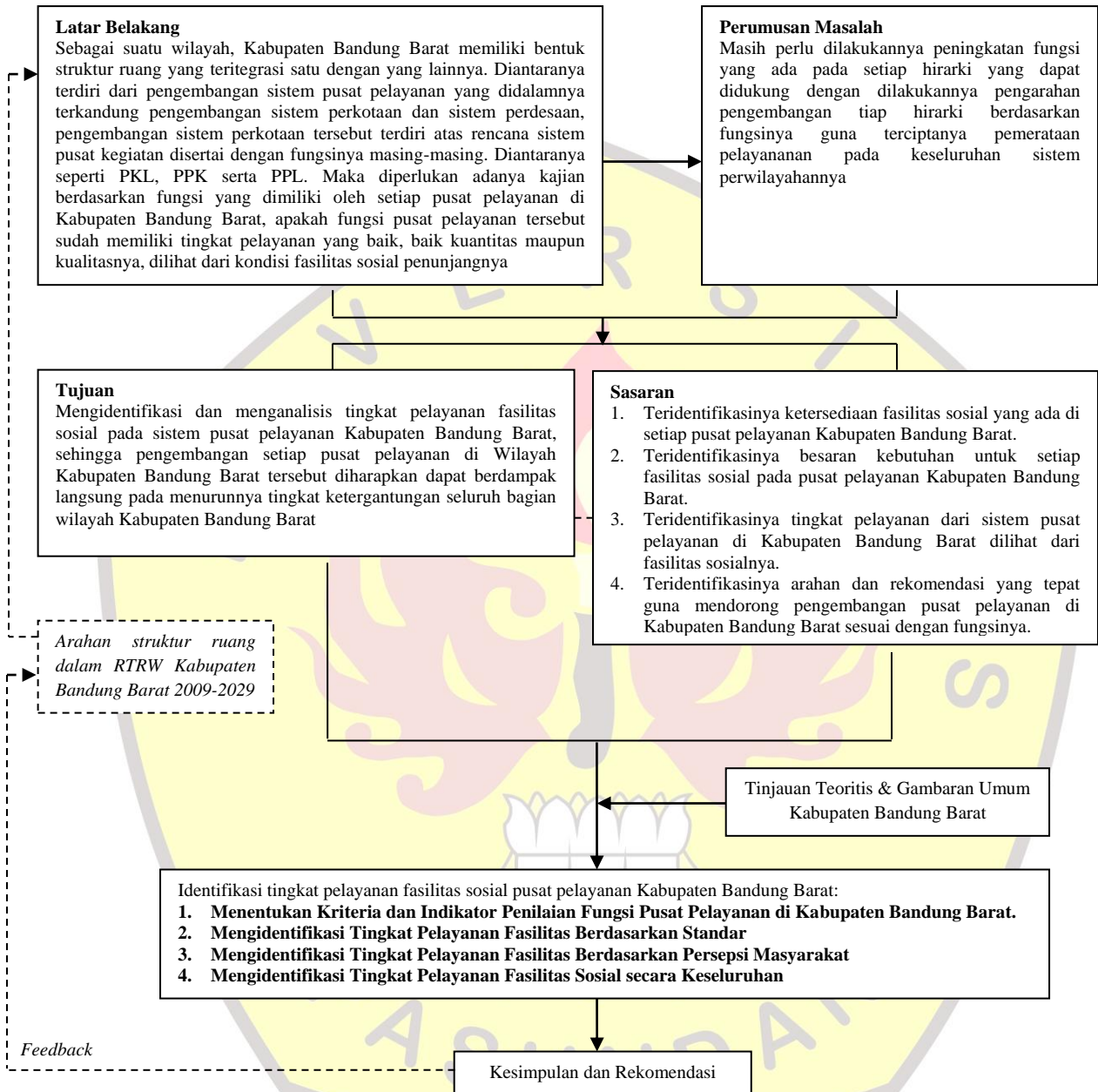
Analisis gabungan ini berupa analisis yang menyandingkan antara hasil perhitungan tingkat pelayanan berdasarkan standar dengan hasil analisis tingkat pelayanan berdasarkan persepsi masyarakat. Dalam hal ini digunakan Metode Campuran, yang mana merupakan suatu prosedur untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mencampur metode kuantitatif dan kualitatif yang bertujuan untuk memahami permasalahan penelitian dan menjelaskkan hasilnya dalam bentuk deskripsi.

Seperti yang sudah dikatakan diatas, metode kuantitatif yang digunakan adalah untuk mencari informasi yang terukur mengenai perbandingan jumlah fasilitas sosial yang sudah ada di Kabupaten Bandung Barat dengan standar minimum berdasarkan SNI 03-1733 tahun 2004. Sedangkan metode kualitatif yang digunakan adalah untuk mendapatkan informasi mengenai bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelayanan fasilitas sosial yang sudah tersedia di Kabupaten Bandung Barat.



Gambar 1.2

KERANGKA PEMIKIRAN STUDI



1.6 Sistematika Pembahasan

Pembahasan studi ini terdiri atas lima bab, yang terdiri dari:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisikan mengenai latar belakang studi, perumusan masalah, tujuan dan sasaran studi, ruang lingkup studi yang terdiri dari ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup substansi, metodologi studi terdiri dari metodologi pendekatan studi, metode pengumpulan data, dan metode analisis, serta sistematika pembahasan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang kajian teoritis mengenai berbagai konsep dan teori yang berkaitan dengan pengembangan struktur pusat pelayanan secara hirarkis terkait fungsi pusat pelayanan. Termasuk juga didalamnya adalah tinjauan standar penyediaan fasilitas pusat pelayanan.

BAB 3 GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI

Bab ini berisikan mengenai gambaran umum Kabupaten Bandung Barat pada aspek kependudukan, serta sarana prasarana. Selain itu, bab ini juga berisi tinjauan umum pengembangan kawasan pusat pelayanan Kabupaten Bandung Barat

BAB 5 ANALISIS TINGKAT PELAYANAN FASILITAS SOSIAL PUSAT PELAYANAN

Bab ini berisikan mengenai analisis yang digunakan dalam studi tingkat pelayanan fasilitas sosial guna menunjang setiap fungsi pusat pelayanan Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya, hasil analisis ini digunakan sebagai dasar untuk memberikan usulan dan saran-saran pada pengembangan pusat pelayanan Kabupaten Bandung Barat.

BAB 6 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bagian akhir ini membahas mengenai kesimpulan studi, implikasi dari hasil studi terhadap rencana pengembangan pusat pelayanan selanjutnya, rekomendasi, serta kelemahan studi dan usulan studi lanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks

- Adisasmita, Rahardjo. 2008. *Pengembangan Wilayah Konsep dan Teori*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jayadinata, Johara T. 1999. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan & Wilayah, Edisi Ketiga*. Bandung: ITB.
- Mulyanto, H.R. 2008. *Prinsip-Prinsip Pengembangan Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rondinelli, Dennis A. 1985. *Applied Methods of Regional Analysis, The Spatial Dimensions of Development Policy*. USA: Westview Press.
- Tarigan, Robinson. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah, Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Yunus, Hadi Sabari. 2000. *Struktur Tata Ruang Kota*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

B. Peraturan Perundang-Undangan

- UU No. 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman
- UU No. 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
- UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 23/MPP/Kep/1/1998
- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2025

C. Terbitan Terbatas

- Dwinanto, Arief. 2005. *Evaluasi Ketersediaan dan Kebutuhan Fasilitas Umum Berdasarkan Persepsi Masyarakat di Lingkungan Perumahan Permata Biru di Kabupaten Bandung*. Bandung: UNPAS
- Fitrilia, Maria. 2009. *Kajian Pengembangan Pusat-Pusat Pelayanan di Wilayah Kabupaten Bandung Barat*. Bandung: UNPAS
- Lisanti, Meyliana. 2015. *Kajian Tingkat Pelayanan Fasilitas Sosial Berdasarkan Persepsi Masyarakat di Perkotaan Subang*. Bandung: UNPAS
- Mulyana, Ali. 2005. *Evaluasi Keoptimalan Lokasi Pusat-Pusat Pelayanan di Wilayah Bandung Timur*. Bandung: ITB
- Puryanti, Vetti. 2007. *Penentuan Pusat-Pusat Pelayanan di Kabupaten Tangerang*. Bandung: UNPAS
- Sanusi, Fahd Tigana. 2010. *Studi Penentuan Pusat-Pusat Pelayanan di Kabupaten Bandung*. Bandung: UNPAS
- Sari, Puspita Kania. 2016. *Studi Kinerja Pelayanan Pusat Primer Kedua Gedebage di Kota Bandung*. Bandung: UNPAS

D. Media Informasi

- <https://leumburkuring.wordpress.com>
- <http://referensi.data.kemdikbud.go.id>
- <http://sekolah.data.kemdikbud.go.id>
- <http://www.bandungbaratkab.go.id>
- <http://www.jabarprov.go.id>